KULIAH XII
UTANG LUAR NEGERI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN BEBAN BUNGA DAN CICILAN HUTANG

Dilihat dari berbagai indicator yang ada , memang utang luar negeri Indonesia sudah terlalu banyak dan sudah membahayakan perkembangan jangka panjang ekonomi Indonesia. Belum lagi ditambah beban pembayaran bunga dan cicilan hutang, dan lonjakan permintaan valuta asing, khususnya dollar AS, yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, sehingga akibatnya kemerosotan nilai rupiah yang sangat significant.

Sampai akhir 2001 krisis masih belum berakhir, dan meskipun perekonomian nasional terus menanggung beban pembayaran bunga dan cicilan utang masa lalu, tetapi ternyata pemerintah malah terus membuat hutang-hutang baru. Dengan kata lain ditengah krisis ekonomi dan usaha untuk keluarga dari krisis ini, Indonesia semakin terjerat dalam jebakan utang. Hal ini bisa menimbulkan persoalan yang sama dalam jangka panjang, yaitu ekonomi kembali mengalami krisis, karena pada saat jatuh tempo nantinya semua kewajiban tersebut harus tetap dibayar. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya manajemen hutang dengan melihat kemampuan membayar jangka panjangnya.

Beban pembayaran

Dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang masih sangat miskin, akumulasi utang pemerintah Orde lama (selama 20 tahun) mencapai $2,38 miliar. Dibandingkan dengan pemerintahan Orde Baru rata-rata pertahun utang luar negerinya $ 5milliar.Namun pada masa Orde lama kapasitas ekonominya sangat rendah, dan dana lebih dialokasikan untuk penggunaan proyek-proyek mercusuar, dan membiayai anggaran angkatan bersenjata, sehingga tidak menggerakan ekonomi nasional.

Manajemen hutang yang kurang baik juga terjadi pada masa orde baru. Dan terkadang hutang luar negeri dianggap sebagai lambing kepercayaan atau kredibilitas pemerintahan asing terhadap Indonesia.Sektor swasta juga banyak yang menginventasikan dananya pada kegiatan yang bersifat jangka panjang, padahal sector yang banyak mengalami kemacetan diataranya adalah sector property.

Posisi Utang LUar Negeri

Posisi utang Luar negeri Indonesia menurut data Bank Indonesia per januari 2001 mencapai $ 140,2 miliar, yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan swasta. Sedangkan menurut proyeksi dari PERC (Pasifik Economic Risk Consultancy) menunjukkan bahwa dalam tahun 2001 total utang luar negeri Indonesia mencapai $ 150 milliar.

Kewajiban pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri sudah sangat membebani anggaran belanja pemerintah. Sedangkan anggaran pemerintah tersebut sumber penerimaannya berasal dari pajak yhang ditarik dari masyarakat, sehingga beban hutang luar negeri pada akhirnya harus dibebankan pada masyarakat luas.

Semakin tahun nilai pinjaman semakin meningkat, maka dapat diduga pada waktu mendatang beban pembayaran bunga dan cicilan akan semakin membengkak. SElanjutnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan terus berlangsung, sebagai akibat meningkatnya valuta asing guna membayar utang tersebut.

Sepanjang devisa yang masuk ke Indonesia cukup besar, maka beban pembayaran utang tersebut tidak terlalu menjadi beban, masalahnya untuk meningkatkan ekspor tersebut banyak tergantung pada factor eksternal atau permintaan dari luar negeri. Perm intaan dari luar negeri akan muncul manakala produk buatan Indonesia memiliki dayasaing yang tinggi, baik dari sisi kualitas maupun harganya.

Dalam level ASEAN sekalipun ternyata saat ini Indonesia masih dilanda kekhawatiran untuk bisa bersaing secara bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Ada sinyalemen yang muncul dari perilaku ekporter Indonesia, dimana sebagian diantara mereka banyak yang memarkir perolehan ekspornya di luar negeri. Ini diakibatkan ketidak percayaan terhadap ketidak pastian politik di Indonesia. Pelaku ekonomi tersebut melakukan langkah-langkah untuk mengamankan perolehan ekspor tersebut. Langkah ini sebenarnya tidak bisa disalahkan karena bagaimanapun para pengusaha selalu berusaha meminimumkan risikonya tetapi menjadi ironis pada saat kita kekuarangn dana.

Jika dilihat dari DSR (Debt Service Rasio)/Rasio Hutang, yang angkanya sudah berkisar sebesdar 50%, telah mengindikasikan bahwa hutang Indonesia sudah jauh diata ukuran aman yaitu sebesar 25%.

Manajemen utang

Muncul berbagai pertanyaan “sampai kapain kita terus tergantung pada utang luar negeri”. Persoalan utang Indonesia adalah berkaitan dengan tidak seimbangnya antara nilai utang yang dibuat dengan kemampuan membayar kembali. Sebagai salah satu Negara yang kekurangan capital, sebenarnya utang luar negeri merupakan salah satu sumber dana yang dapat mendukung percepatan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya pemerintah telah menetapkan prinsip anggara yang dinamis, yang atara lain menekankan kemandirian dalam pembangunan. Anggaran pembangunan diharapkan semakin besar berasal dari dukungan tabungan pemerintah, dan utang luar negeri sebagai pelengkap. Namun kenyataan tersebut tidak selalu tercapai, bahkan pada saat k risis semua anggaran pembangunan dan sebagian anggaran rutin ditutup dari utang luar negeri. Ini menggambarkan semakin tergantungnya anggaran pembangunan pemerintah pada dana pinjaman internasional.

Di sisi lain sepertinya tidak ada perjuangan untuk menurunkan utang, lebih-lebih menuntut pemotongan utang, yang sebagian dianggap sebagai odious debt atau utang yang diselewengkan oleh birokrasi.

Malaysia, tingkat kemandiriannya lebih baik, dan sebelum krisis 1997 pemerintah Malaysia menolak pinjaman IMF, dan kebijakan tersebut ternyata mampu mereduksi dampak krisi ekonomi yang ada.

Untuk dapat men ingkatkan kemandirian disamping sumber dari pajak, pemrintah harus dapat mengefisienkan sumber pendapatan dari hasil sumber daya alam, meningkatkan penerimaan BUMN yagn selama ini kurang efisien. Dan sebenarnya banyak potensi dana yang bisa diperoleh tanpa harus tergantung pada luar negeri.

Dengan manajemen penerimaan dan pengeluaran yang baik diharapkan dapat deprogram zero foreign debt. Dimana setelah kurun waktu beberapa tahun adan ya skema untuk menghentikan pinjaman luar negeri.

Jebakan utang

Naiknya nilai tukar valuta asing atau anjloknya nilai rupiah telah menimbulkan goncangan besar pada perekonomian nasional yang ditandai dengan naiknya harga, merosotnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dsb. Tanpa adanya usaha serius untuk melepaskan diri dari utang luar negeri, akan berakibat semakin terjebaknya Indonesia dalam jeratan utang (debt trap)

Bantuan dari lembaga keuangan international seperti IMF dan Bank DUnia sebenarnya sangat diharapkan membantu perekonomian Indonesia tetapi kenyataannya justru malah membenamkan Indonesia dala jebakan utang yang makin besar.

“Tidak ada kisah sukses suatu Negara sedang berkembang dalam membangun perekonomiannya karena bekerja sama dengan lembaga keuangan multilateral. Transfer negative dan subsidi moneter dari Negara penerima utang Negara maju sudah semakin tinggi dari tahun ke tahun, bahkan berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena sumber daya alam hutan dieksploitasi untuk melayani pembayaran utang luar negeri dengan Debt servise ration yang semakin membengkak” Rachbini, 1995.

Melakukan penjadwalan secara ketat menujut utang luar negeri hingga pada titik nol, sehingga beban pembayaran bunga dan cicilan pada masa mendatang tidak membebani perekonomian dan generasi mendatang.